

LAPORAN KINERJA (LKJ)
TRIWULAN III
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019



Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 17 Telp (0517) 22703 – 21278 Fax (0517) 21081 Kandangan - 71212

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Triwulan III Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Laporan kinerja triwulan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari capaian realisasi triwulan III ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai yang diharapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 3 (tiga) triwulan, walaupun dengan capaian kinerja triwulan III yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada triwulan berikutnya

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Oktober 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681010 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
1.3 ISU STRATEGIS	7
1.4 DASAR HUKUM	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	9
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	23
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV : PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	13
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2018	14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan III Tahun 2019	24
Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pada Sekretariat Triwulan III Tahun 2019	34
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang PAUD dan DIKMAS Triwulan III Tahun 2019	35
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SD Triwulan III Tahun 2019	36
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SMP Triwulan III Tahun 2019	38
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Kebudayaan Triwulan III Tahun 2019	39

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran	11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Sasaran	13
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2019	14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2019	22
Tabel 3.2 Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 3.3 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan III Tahun 2019	24
Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pada Sekretariat Triwulan III Tahun 2019	34
Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang PAUD dan DIKMAS Triwulan III Tahun 2019	36
Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SD Triwulan III Tahun 2019	37
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Pendidikan SMP Triwulan III Tahun 2019	38
Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Pada Bidang Kebudayaan Triwulan III Tahun 2019	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan capaian kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama SKPD.

Laporan capaian kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan capaian kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Pembentukan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Sekretariat :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

c. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

e. Bidang Kebudayaan :

1. Seksi Kesenian;
2. Seksi Kebudayaan; dan
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan serta tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi

barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

2. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan.
3. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**

Bidang Bina Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan, dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

➤ **Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, mempunyai melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen

sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
3. Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama.

➤ **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyiapkan bahan dan melaksanakan

pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

➤ **Bidang Kebudayaan**

Bidang kebudayaan, mempunyai tugas kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sejarah, napak tilas, olahraga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian kesenian rakyat.
2. Seksi Budaya, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian dan penelusuran nilai budaya daerah dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan penelusuran sejarah, napak tilas, museum dan kepurbakalaan.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1. Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Satuan Pendidikan Daerah.
2. Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal'
3. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan di bidang pendidikan, Karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang disusun dirumuskan dari permasalahan serta tantangan yang di dihadapi ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian, Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi, isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah dasar yang bermutu;
3. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah dasar;
4. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah menengah pertama yang bermutu;
5. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah menengah pertama;
6. Belum optimalnya upaya Pelestarian bangunan dan benda cagar budaya;
7. Masih rendahnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan mencakup :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan **strategi** atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai **strategi** ini.

Dalam menyusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

”Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter, Cerdas, Kompetitif Serta Memiliki Iman Dan Taqwa”

2. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan;
2. Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
3. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
4. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendidikan yaitu :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;
5. Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

4. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;
5. Meningkatnya percepatan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal 2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik 3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik 5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD 6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A 7. Persentase PNF yang terakreditasi 8. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar 12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik 13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD 14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar 15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A 17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar 18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar 19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama 23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP 25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama 26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B

			<p>27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A</p> <p>28. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama</p> <p>29. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama</p> <p>30. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama</p>
2	Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	<p>31. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi</p> <p>32. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi</p>
3	Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	<p>33. Persentase kesenian daerah yang aktif</p> <p>34. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara</p>
4	Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	<p>35. Indeks kepuasan masyarakat</p> <p>36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik</p> <p>37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik</p> <p>38. Persentase mobil operasional laik jalan</p> <p>39. Persentase mobil dinas laik jalan</p> <p>40. Persentase kendaraan dinas laik jalan</p> <p>41. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA</p> <p>43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat</p> <p>44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat</p> <p>45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu</p> <p>46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat</p>

5. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama.	Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini; Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini; Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;	Meningkatnya percepatan pemenuhan SPM	Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar	Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah dasar Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah menengah pertama

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Melestarikan bangunan dan benda cagar budaya dan	Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah
Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

6. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019

No	Program/Kegiatan
1	2
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa administrasi kantor
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
	Penyediaan makanan dan minuman
	Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis lainnya
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan Dokumen Keuangan
	Penyusunan Dokumen AKIP
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
	Pembinaan dewan pendidikan
	Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
	Peringatan Hari Guru
	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Penambahan ruang kelas sekolah
	Pembangunan gedung sekolah
	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa
	Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga
	Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PA
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Pengadaan buku-buku dan alat siswa (DAK)
	Program Pendidikan Non Formal
	Penyelenggaraan paket C setara SMU
	Penyelenggaraan paket B setara SMP
	Penyelenggaraan non formal
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)
	Penyelenggaraan paket C setara SMU/BOP kesetaraan DAK
	Penyelenggaraan paket C setara SMP/BOP kesetaraan DAK
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir
	Pembangunan ruang ibadah
	Pembangunan perpustakaan sekolah
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pembangunan pagar sekolah
	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD
	Pelaksanaan ujian Sekolah (UN) SD
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

	manajemen berbasis sekolah (MBS) si satuan pendidikan dasar
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)
	Pembayaran sarana air bersih dan sanitary (DAK)
	Penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB/dan SMP/MA
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK)
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pembangunan ruang ibadah
	Pengadaan meubeler sekolah
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP
	Pelaksanaan Ujian Sekolah (UN) SMP
	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah
	Rehabilitasi ruang kelas sekolah
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)
	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
	Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif (DAK)
	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
	Perkembangan keragaman budaya daerah
	Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
	Festival budaya meratus
	Festival olaharag tradisional dan permainan rakyat
	Festival karasmin banua
	Festival luar daerah
	Penelolaan permusiuman (DAK)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-

kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Di bawah ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 – 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		2.	Rata - Rata Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
		3.	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.	Persentase PAUD Formal berakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5.	Predikat AKIP	Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Berikut perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 :

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A Persentase PNF yang terakreditasi Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama	75,30% 100% 100% 100% 80 50 lembaga 3 lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah 0% 100% 99% 80,29% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah

		Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama	0%
		Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama	100%
Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya		Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi	9 bcb
		Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi	13 bcb
Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah		Persentase kesenian daerah yang aktif	11 macam
		Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara	11 macam
Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu		Indeks kepuasan masyarakat	81
		Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	72 macam
		Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	51 macam
		Persentase mobil operasional laik jalan	1 unit
		Persentase mobil dinas laik jalan	1 unit
		Persentase kendaraan dinas laik jalan	300 unit
		Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA	100%
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	A
		Persentase laporan yang dibuat tepat waktu	3 laporan
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan Laporan Capaian Kinerja Tahun ke lima dari Renstra 2018-2023. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam Renstra.

Laporan kinerja Triwulan III Dinas Pendidikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi capaian atas indikator kinerja utama adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Triwulan III
Tahun Anggaran 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi	Capaian
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal	%	75,30%	78,63%	104,4%
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100%	100,91%	100,91%
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	99%	93,14%	94,08%
4.	Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100%	98,83%	98,83%
5.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100%	100%	100%
6.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100%	100%	100%

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator
1.	Harapan lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2.	Rata-rata lama sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$
3.	Persentasi Satuan Pendidikan Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$
4.	Persentasi Paud Formal Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$
5.	Predikat Akip	Hasil Evaluasi Akip

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan III Tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sungai Selatan pada triwulan III sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Triwulan III Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Realisasi Triwulan III	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal 2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik 3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV 4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik 5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD 6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A 7. Persentase PNF yang terakreditasi 8. Persentase penduduk yang berusia \geq 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar 12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik 13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD 14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar 15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A 17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar 18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar 19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar 20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama 23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik 24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP 25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama 26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A 	<ol style="list-style-type: none"> 76,65% 100% 100% 100% 80 50 lembaga 3 lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 2 sekolah 0% 100% 99% 80,29% 100% 100% 80 100% 100% 3 sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 78,63% 100% 57,78% 30% - 2 3 98,83% 100,91% 94,29% 82,73% 60% - 87,91% 100% 3 sekolah 4 sekolah 0,15% 74% 93,14% 76,29% 91,14% 77,13% - 82,99% 100% 6 sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 104,4% 100% 57,78% 16,25% - - - 98,77% 100,91% 94,29% 82,73% - - 87,91% 100% 3 sekolah 4 sekolah 0% 74% 94,08% 95,02% 91,14% 77,13% - 82,99% 100% 6 sekolah

<p>Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya</p> <p>Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah</p> <p>Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu</p>	28. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah
	29. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama	0%	0,74%	0%
	30. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama	100%	74,11%	74,11%
	31. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi	9 bcb	6 bcb	22,22%
	32. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi	13 bcb	9 bcb	7,69%
	33. Persentase kesenian daerah yang aktif	11 macam	11 macam	100%
	34. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara	11 macam	4 macam	36,36%
	35. Indeks kepuasan masyarakat	81	81,48	81,48
	36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	72 macam	72 macam	100%
	37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	51 macam	51 macam	100%
	38. Persentase mobil operasional laik jalan	1 unit	1 unit	100%
	39. Persentase mobil dinas laik jalan	1 unit	1 unit	100%
	40. Persentase kendaraan dinas laik jalan	300 unit	300 unit	100%
	41. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA	100%	100%	100%
	43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%	100%	100%
	44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	A	BB	-
	45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu	3 laporan	3 laporan	100%
	46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di PAUD dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4 – 6 Tahun dikali 100%. APK PAUD pada triwulan III realisasinya masih di angka 78,63% (Jumlah siswa PAUD usia 4 – 6 tahun 16.275 dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun 22.302). dari target 76,65%.

2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana prasarana PAUD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik pada triwulan III sebesar 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah guru yang ada dikali 100%. Realisasi indikator kinerja sebesar 57,78% dari 100% yang ditargetkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya guru yang sudah memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak bersedia lagi untuk melanjutkan ke S1.

4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik.

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik PAUD formal yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik PAUD formal dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 30% dari target 100%.

5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan III masih belum ada disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD masih dalam proses (baru proses pretest).

6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi A dibagi jumlah lembaga PAUD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 2 lembaga 50 lembaga yang ditargetkan.

7. Persentase PNF yang terakreditasi

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah PNF yang terakreditasi dibagi jumlah PNF yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 3 (tiga) lembaga dari 3 (tiga) lembaga yang ditargetkan.

8. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III masih berada pada 98,83% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 175.073 dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 177.146) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,83%.

9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 100,91% (Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A 25.290 dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun 25.062) dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 100,91% .

10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 94,29% (jumlah peserta didik usia 7 - 12 tahun 23.630 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun 25.062) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 94,29%. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 7 -12 tahun menyebabkan pencapaian APM SD/MI belum terpenuhi.

11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah tenaga pendidik yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 82,73% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 82,73%.

12. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah tenaga pendidik SD yang ada dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III 60% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 60%.

13. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan III masih belum ada realisasi disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik sekolah dasar masih dalam proses.

14. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah lulusan pada pada jenjang

pendidikan yg lebih rendah. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 87,91% dengan capaian kinerja sebesar 87,91%.

15. Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 100%.

16. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah dasar yang terakreditasi A dibagi jumlah sekolah yang ada dikali 100. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 3 sekolah dari 3 sekolah yang ditargetkan..

17. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah hijau yang ada dibagi jumlah sekolah satuan sekolah dasar seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 4 sekolah dari 2 sekolah yang ditargetkan.

18. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 0,15% dari 0% yang ditargetkan.

19. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah IP SPM yang tercapai dibagi jumlah 27 IP SPM. Realisasi indikator triwulan III sebesar 74% dari 100% yang ditargetkan.

20. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SMP/MTs/Paket B (11.255) dibagi jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun (12.084) dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 93,14% dari 99% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 93,14%.

21. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 76,29% (jumlah peserta didik usia 13- 15

tahun 9.218 dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 12.084) dari 80,29% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 95,02%.

22. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV (946 orang) dibagi jumlah tenaga pendidik seluruhnya (1.038) dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 91,14% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 91,14%.

23. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah tenaga pendidik SMP seluruhnya dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 77,13% dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 77,13%.

24. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP

Angka diperoleh dari hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan nilai kelulusan 80. Realisasi indikator pada triwulan III masih belum ada realisasi disebabkan kegiatan test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik sekolah dasar masih dalam proses.

25. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu (2.576 orang) dibagi jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yg lebih rendah (3.104 orang) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 82,99% dari target 100% dengan capaian sebesar 82,99%.

26. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/MTs (2.852) dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya (2.852) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan

27. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi A dibagi jumlah sekolah menengah pertama

seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 6 sekolah dari jumlah sekolah 32 buah dengan realisasi sebesar 18,75%.

28. *Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama dibagi jumlah sekolah menengah pertama seluruhnya. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 2 sekolah.

29. *Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah lagi (75 orang) dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang pernah/sedang bersekolah (10.079) dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 75 orang atau 0,74% dari 0% yang ditargetkan.

30. *Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah IP SPM yang tercapai dibagi jumlah 27 IP SPM. Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 74,11% dari 100% yang ditargetkan.

31. *Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi dibagi jumlah cagar budaya bangunan yang ada. Realisasi triwulan III sebanyak 6 bcb dari 9 bcb yang ditargetkan dengan capaian kinerja 66.66%.

32. *Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi dibagi jumlah cagar budaya (makam) yang ada. Realisasi triwulan III sebanyak 9 bcb dari 13 bcb yang ditargetkan dengan capaian 69,23%.

33. *Persentase kesenian daerah yang aktif*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kesenian daerah yang aktif dibagi jumlah kesenian daerah yang ada. Realisasi pada triwulan III sebanyak 11 macam dari 11 macam yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 100%.

34. *Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara dibagi jumlah budaya daerah yang ada. Realisasi pada triwulan III sebanyak 4 macam dari 11 yang ditargetkan

35. Indeks kepuasan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk realisasi indeks kepuasan masyarakat pada triwulan III 81,48%

36. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah peralatan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada triwulan III 72 macam dari 72 macam yang ditargetkan.

37. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada triwulan III 51 macam dari 51 macam yang ditargetkan.

38. Persentase mobil operasional laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil operasional laik jalan di bagi mobil operasional yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan III sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

39. Persentase mobil dinas laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil dinas yang laik jalan dibagi jumlah mobil dinas yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan III sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

40. Persentase kendaraan dinas laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kendaraan dinas yang laik jalan dibagi jumlah kendaraan dinas yang ada dikali 100%. Realisasi triwulan III sebanyak 300 unit dari 300 unit yang ditargetkan.

41. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian

yang ada dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

42. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA. Realisasi indikator triwulan III sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

43. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%. Realisasi indikator triwulan III sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan pada Tahun 2017 kategori BB dengan nilai 74,44 (sangat baik).

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memperoleh nilai A.

45. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah laporang yang dibuat tepat waktu dibagi jumlah laporan yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan III sebanyak 3 laporan dari 3 laporan yang ditargetkan.

46. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%. Selain persentase tindak lanjut atas

hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kab. HSS.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Bidang Sekretariat :

Tabel 3.4
Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Triwulan III Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa administrasi kantor	142.785.630	76.011.800
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.900.000	102.599.440
3	Penyebarnya informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	19.000.000	-
4	Penyediaan makanan dan minuman	72.830.000	31.947.500
5	Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis lainnya	3.683.450.000	1.787.003.528
6	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan.	1.275.626.500	954.575.363
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.325.000	61.035.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	519.500.000	167.444.537
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	5.289.000
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.425.000	1.819.650
2	Penyusunan Dokumen AKIP	4.425.000	1.775.250
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		
1	Pembinaan dewan pendidikan	22.392.000	3.500.000

2	Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	433.370.000	389.254.800
3	Peringatan Hari Guru	144.600.000	-
4	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah	58.350.000	-
Jumlah		6.846.479.130	3.582.255.868

Program dan kegiatan di sekretariat di dukung dengan dana sebesar Rp.6.846.479.130 dengan realisasi keuangan pada triwulan III sebesar Rp. 3.582.255.868 .Selain mendukung kegiatan untuk bidang (Bidang PAUD dan DIKMAS, Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP dan Bidang Kebudayaan) juga mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik;
3. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik;
4. Persentase mobil operasional laik jalan;
5. Persentase mobil dinas laik jalan;
6. Persentase kendaraan dinas laik jalan;
7. Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu;
8. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA;
9. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat;
10. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat;
11. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu;
12. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada secretariat.

2. Bidang PAUD Dan DIKMAS :

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi pada Bidang PAUD Dan DIKMAS
Triwulan III Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
1	Penambahan ruang kelas sekolah	177.500.00	176.071.000
2	Pembangunan gedung sekolah	188.200.000	-
3	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)	216.754.975	126.863.783
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	77.657.850	53.730.498
5	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	188.210.000	-
6	Pengadaan meubeler sekolah	114.080.000	-
7	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa	99.950.000	-

8	Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga	61.975.000	-
9	Sosialisasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS	16.135.000	16.135.000
10	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1.191.054.000	-
11	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	36.635.000	36.635.000
12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PA	210.000.000	72.095.250
13	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	78.000.000	-
14	Pengadaan buku-buku dan alat siswa (DAK)	39.000.000	-
Program Pendidikan Non Formal			
1	Penyelenggaraan paket C setara SMU	204.550.000	-
2	Penyelenggaraan paket B setara SMP	132.460.000	-
3	Penyelenggaraan non formal	121.875.000	62.619.500
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal (DAK)	1.118.251.175	537.264.000
5	Penyelenggaraan paket C setara SMU/BOP kesetaraan DAK	45.000.000	9.000.000
6	Penyelenggaraan paket C setara SMP/BOP kesetaraan DAK	105.000.000	26.850.000
JUMLAH		4.422.288.000	1.117.264.031

Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan DIKMAS didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 4.422.288.000 dengan realisasi keuangan pada triwulan III sebesar Rp. 1.117.264.031. Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan DIKMAS mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal;
2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik;
3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV;
4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik;
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD;
6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A.
7. Persentase PNF yang terakreditasi
8. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).

3. Bidang Pendidikan SD :

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SD
Triwulan III Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar		

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir	764.450.000	745.867.000
Pembangunan ruang ibadah	324.800.000	323.850.000
Pembangunan perpustakaan sekolah	197.350.000	71.677.000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	249.900.000	91.772.000
Pengadaan meubeler sekolah	200.610.000	200.110.000
Pembangunan pagar sekolah	372.950.000	371.379.000
Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa SD	408.477.100	369.328.700
Pelaksanaan ujian Sekolah (UN) SD	273.512.500	273.215.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	3.367.425.000	741.493.000
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) si satuan pendidikan dasar	8.435.000.000	5.280.500.000
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	1.908.080.000	1.334.140.000
Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	110.038.000	76.866.600
Pembayaran sarana air bersih dan sanitary (DAK)	261.285.000	181.975.500
Penyediaan buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB/dan SMP/MA	1.004.675.000	199.999.484
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	182.970.000	12.690.500
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK)	102.697.000	71.727.900
Jumlah	18.164.219.600	9.977.262.984

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 18.164.219.600 dengan realisasi keuangan pada triwulan III sebesar .977.262.984 Rp. Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar
4. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar
7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
8. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar

4. Bidang Pendidikan SMP :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SMP
Triwulan III Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pembangunan ruang ibadah	322.900.000	313.048.000
	Pengadaan meubeler sekolah	200.190.000	199.690.000
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	614.750.000	476.255.000
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP	234.025.000	191.238.000
	Pelaksanaan Ujian Sekolah (UN) SMP	598.679.000	570.183.400
	Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah	217.250.000	216.938.000
	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	1.179.702.000	402.548.258
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	2.060.600.000	1.439.545.000
	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah (DAK)	793.860.000	553.977.000
	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)	1.317.630.000	920.616.000
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)	1.029.290.000	718.723.000
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK)	259.900.000	180.780.000
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	263.330.000	70.654.100
	Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif (DAK)	231.840.000	161.809.000
	Jumlah	9.324.446.000	5.697.281.758

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SMP didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 9.324.446.000 terealisasi keuangan pada triwulan III sebesar Rp. 5.697.281.758 Program kegiatan pada bidang pendidikan SMP ini mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama
4. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama

7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
8. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama

5. Bidang Kebudayaan :

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Kebudayaan
Triwulan III Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya		
	Perkembangan keragaman budaya daerah	169.405.000	94.290.000
	Pembinaan dan pelestarian nilai sejarah dan perjuangan bangsa	404.466.000	404.466.000
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	712.028.000	269.522.711
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	277.655.000	146.771.500
	Festival budaya meratus	65.072.500	-
	Festival olahrag tradisional dan permainan rakyat	164.232.500	91.450.000
	Festival karasmin banua	113.490.000	-
	Festival luar daerah	73.750.000	56.500.000
	Penelolaan permusiuman (DAK)	450.000.000	277.073.100
	Jumlah	2.457.099.000	1.339.673.311

Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 2.457.099.000 terealisasi keuangan pada triwulan III sebesar Rp. 1.339.673.311 Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi;
2. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi;
3. Persentase kesenian daerah yang aktif;
4. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Triwulan III yang dapat disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang;
2. Masih ada indikator kinerja sasaran yang tidak didukung oleh program dan kegiatan;
3. Masih ada program dan kegiatan yang tidak mendukung pada indikator kinerja;
4. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Melihat kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat diambil langkah - langkah sebagai berikut:

1. Agar menempatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang dibutuhkan;
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan harus mengacu pada indikator sasaran strategis;
3. Untuk mempercepat pencapaian indikator sasaran strategis maka harus didukung oleh program dan kegiatan yang mendukung pada indikator sasaran strategis tersebut;
4. Jadwal setiap kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Oktober 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681010 199603 1 004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019



Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat : Jalan Melati Nomor 17 Telp (0517) 22703 – 21278 Fax (0517) 21081 Kandungan - 71212

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD	2
1.3 ISU STRATEGIS	7
1.4 DASAR HUKUM	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	9
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	23
3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	33
BAB IV : PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	HubunganTujuandanSasaran	11
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, StrategidanKebijakan	13
Tabel 2.3	Program danKegiatanDinasPendidikanTahun 2018	14
Tabel 2.4	IndikatorKinerjaUtama (IKU)	18
Tabel 2.5	PerjanjianKinerjaDinasPendidikanKabupatenHulu Sungai Selatan Tahun 2018	20
Tabel 3.1	CapaianIndikatorKinerjaUtama (IKU) PadaTriwulan IVTahunAnggaran 2018	22
Tabel 3.2	PerhitunganIndikatorKinerjaUtama (IKU)	23
Tabel 3.3	SasaranStrategisDinasPendidikanTriwulan IVTahun 2018	24
Tabel 3.4	AlokasidanRealisasiPadaSekretariatTriwulan IVTahun 2018	34
Tabel 3.5	AlokasidanRealisasiPadaBidang PAUD dan DIKMAS Triwulan IV Tahun 2018	35
Tabel 3.6	AlokasidanRealisasiPadaBidangPendidikan SD Triwulan IVTahun 2018	36
Tabel 3.7	AlokasidanRealisasiPadaBidangPendidikan SMP Triwulan IVTahun 2018	38
Tabel 3.8	AlokasidanRealisasiPadaBidangKebudayaanTriwulan IVTahun 2018	39

KATA PENGANTAR

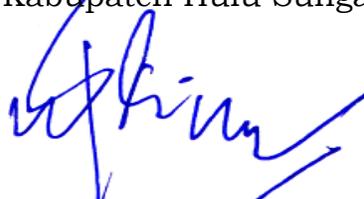
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami mampu menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara ber kelanjutan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kami menyadari capaian realisasi pada Laporan Kinerja ini belum memuaskan karena tidak semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai yang dengan yang ditargetkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang aktivitas dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019, walaupun dengan capaian kinerja yang belum begitu baik. Kami berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun - tahun berikutnya

Demikain laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, April 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681010 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan capaian kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama SKPD.

Laporan capaian kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan capaian kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan kebudayaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Serta bidang Kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

a. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat yaitu :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pendidikan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
6. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan;
7. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
8. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2). Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Pendidikan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Pendidikan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pendidikan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Pendidikan SD,

Pendidikan SMP, Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Serta Kebudayaan;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

3). Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;

- i. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Bina Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah dasar.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan, dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

3. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, mempunyai melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan pelaksanaan kurikulum

dan penilaian, manajemen sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.
2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
3. Seksi Sarana dan Prasarana sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana menengah pertama.

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Manajemen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pembinaan dan pengembangan lembaga, tenaga

pendidik dan kependidikan pendidik anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

2. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta perancangan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olah raga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olah raga tradisional permuseuman dan penelitian kepurbakalaan;
2. Penyusunan program pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelitian nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas, olah raga tradisional permuseuman dan penelitian kepurbakalaan;
3. Koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sejarah, napak tilas olah raga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan

4. Pengawasan dan pengendalian program pembinaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas olah raga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan
5. Koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas olah raga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan
6. Evaluasi dan pelaporan program pembinaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan dan penelusuran nilai budaya, penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, napak tilas olah raga tradisional, permuseuman dan penelitian kepurbakalaan

Bidang Kebudayaan terdiri dari dua seksi yaitu:

- a). Seksi Kesenian dan Kebudayaan yang mempunyai tugas sbb:
 1. menyusun rencana kegiatan seksi kesenian dan kebudayaan;
 2. menghimpun dan mengolah data kesenian rakyat, baik kesenian tradisional maupun kontemporer, cabang seni, tokoh seni, dan organisasi kesenian;
 3. menginventarisasi dan mengolah data potensi nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 4. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesenian tradisional dan kontemporer;
 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, penelusuran potensi nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 6. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan pementasan kesenian daerah;

7. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, penelusuran potensi olah raga tradisional dan nilai budaya daerah serta penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 8. melaksanakan pelestarian tradisi masyarakat dalam daerah;
 9. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka mendorong, mengarahkan dan meningkatkan organisasi kesenian tradisional dan kesenian kontemporer dan pegelaran kesenian rakyat;
 10. melaksanakan pembinaan lembaga adat daerah;
 11. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pegelaran dan kesenian rakyat baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer;
 12. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan pihak terkait dalam rangka pengembangan nilai budaya daerah dan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pegelaran dan kesenian rakyat baik kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer;
 13. menghimpun dan mengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesenian dan bukontemporer;
 13. menghimpun dan mengolah data dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesenian dan budaya daerah; dan
 14. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugas
- b). Seksi Cagar Budaya Permuseuman dan Sejarah yang mempunyai tugas sbb:
1. menyusun rencana kegiatan seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
 2. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan museum, penggalan

dan penyelamatan serta perlindungan bangunan bersejarah;

3. menginventarisasi dan mengolah data bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
4. melaksanakan pemeliharaan, penggalian, penyelamatan dan perlindungan bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
5. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelamatan dan perlindungan mengenai bangunan bersejarah dan situs kepurbakalaan;
6. menyiapkan bahan dan menetapkan serta mengelola menetapkan serta mengelola menetapkan serta mengelola cagar budaya daerah;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dan pihak lain pembinaan dan pengembangan permuseuman, kepurbakalaan dan peninggalan sejarah;
8. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi usul pemberian bantuan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan permuseuman kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
9. melaksanakan penelusuran dan penelitian serta penulisan sejarah perjuangan sebelum dan sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. melaksanakan kegiatan napak tilas Divisi ALRI Pertahanan Kalimantan; dan
11. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugasnya

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Satuan Pendidikan Daerah.
2. Satuan Pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal'

3. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan terutama pembangunan di bidang pendidikan, Karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang disusun dirumuskan dari permasalahan serta tantangan yang di dihadapi ke depan, serta mengakomodir berbagai isu kebijakan regional maupun nasional.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian, Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi, isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
2. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah dasar yang bermutu;
3. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah dasar;
4. Masih rendahnya layanan pendidikan satuan sekolah menengah pertama yang bermutu;
5. Belum terpenuhinya SPM pada satuan sekolah menengah pertama;
6. Belum optimalnya upaya Pelestarian bangunan dan benda cagar budaya;

7. Masih rendahnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan mencakup :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistenm Pendidikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 85 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan **strategi** atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai **strategi** ini.

Dalam menyusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendidikan yaitu :

1. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;

5. Percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

2. Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kesenian dan budaya daerah;
5. Meningkatnya percepatan pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;
6. Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Melek Huruf 2. Angka rata – rata lama sekolah 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A 8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B

			<p>9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>10. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI</p> <p>11. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts/ Paket B</p> <p>12. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C</p> <p>13. Angka Kelulusan (AL) SD/MI</p> <p>14. Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts</p> <p>15. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA</p> <p>16. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts</p> <p>17. Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA</p> <p>18. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik</p> <p>19. Sekolah pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik</p> <p>20. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan sekolah dasar</p> <p>21. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah</p> <p>22. Rasio guru/murid pendidikan dasar</p> <p>23. Rasio guru terhadap pendidikan menengah</p> <p>24. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata</p> <p>25. Angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 tahun, perempuan dan laki-laki</p> <p>26. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)</p> <p>27. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV</p> <p>28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>29. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat</p> <p>30. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar</p>
2	Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	<p>31. Penyelenggaraan festival seni dan budaya</p> <p>32. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</p> <p>33. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi</p> <p>34. Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu</p>
3	Meningkatkan layanan dan akuntabilitas	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang	<p>35. Nilai AKIP</p> <p>36. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>

	kinerja yang bermutu	bermutu	37. Persentasi temuan inspektorat/BPK RI yang ditindaklanjuti 38. Persentasi keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
--	----------------------	---------	---

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Memperluas akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Memperluas akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Memperluas akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama;
4. Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah;
5. Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar;
6. Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama.	Memperluas Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; Memperluas Akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Memperluas Akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama	Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini; Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar; Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama
Meningkatkan percepatan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar;	Meningkatnya percepatan pemenuhan SPM	Mempercepat pencapaian Pemenuhan SPM pendidikan dasar	Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah dasar Mempercepat pemenuhan SPM satuan sekolah menengah pertama
Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya Meningkatkan pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Melestarikan bangunan dan benda cagar budaya	Meningkatkan upaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya daerah
Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Memberikan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu

4. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKANTAHUN 2019

No	Program/Kegiatan
1	2
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa dan administrasi kantor
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
4	Penyediaan makanan dan minuman
5	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan lapangan
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1	Penyusunan Dokumen Keuangan
2	Penyusunan Dokumen Akip
D	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
1	Pembinaan Dewan Pendidikan
2	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
3	Peringatan Hari Guru
4	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah
E	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
2	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
3	Pengadaan mebeluer sekolah
4	Bimbingan Teknis Pendidikan Keluarga
5	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Paud dan Dimas
6	Pelatihan Kompetensi tenaga Pendidik
7	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
9	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa {DAK}
10	Pengadaan Buku buku dan alat tulis siswa (DAK)
F	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat

1	Penyelenggaraan Paket C setara SMA
2	Penyelenggaraan Paket B setara SMP
3	Penyelenggaraan Lembaga Non Formal
4	Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal {DAK}
5	Penyelenggaraan Paket C setara SMA/BOP kesetaraan (DAK)
6	Penyelenggaraan Paket B setara SMP/ BOP kekesetaraan {DAK}
G	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
1	Perkembangan keragaman Budaya Daerah
2	Pembinaan dan Pelestarian Nilai Sejarah dan Perjuangan Bangsa
3	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
4	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah
5	Festival Budaya Meratus
6	Festival Olah Raga Tradisional dan Permainan Rakyat
7	Festival Karasmin banua
8	Festival Luar Daerah
9	Pengelolaan Permuseuman (DAK)
H	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
2	Pembangunan ruang ibadah
3	Pembangunan perpustakaan sekolah
4	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
5	Pengadaan mebeluer sekolah
6	Pembangunan pagar sekolah
7	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
8	Pelaksanaan ujian sekolaian sekolah (UN) SD
9	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
10	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah {MBS} di satuan Pendidikan Dasar
11	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD
12	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah {DAK}
13	Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah {DAK}
14	Pembayaran sarana air bersih dan sanitary {DAK}
15	Penyediaan Buku pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB/SMP/Mts {DAK}
16	Penadaan alat praktik dan peraga siswa {DAK}
I	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	Pembangunan ruang ibadah
2	Pengadaan Mebeluer sekolah
3	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan parkir
4	Pembinaan Minat Bakat dan kreativitas siswa SMP
5	Pelaksanaan ujian {UN} SMP
6	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
7	Rehabilitasi ruang kelas sekolah

8	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah {DAK}
9	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah {DAK}
10	Pembangunan ruang perpustakaan sekolah {DAK}
11	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah {DAK}
12	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi {DAK}
13	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
14	Pembangunan ruang pusat sumber belajar inklusif {DAK}

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA SKPD. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Di bawah ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018– 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	DINAS PENDIDIKAN	Badan Pusat Statistik
		2. Rata - Rata Lama Sekolah	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$	DINAS PENDIDIKAN	Badan Pusat Statistik
		3. Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		4. Persentase PAUD Formal berakreditasi A	Sebagai Salah Satu Hasil Akuntabilitas Kinerja OPD	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakreditasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

		5	Predikat AKIP	Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
--	--	---	---------------	---	---------------------	------------------	------------------

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Berikut perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019:

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka melek huruf Angka rata- rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar (PAUD) Paud Angka Partisipasi Murni (AMP) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts Angka Kelulusan (AL) SMA/MA Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/Mts Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA Fasilitas Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Fasilitas Pendidikan SMP/Mts Kondisi bangunan baik Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah menengah Rasio guru/ murid per kelas rata – rata sekolah dasar Rasio guru/ murid per kelas rata- rata sekolah menengah Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat	99,79 % 8 Tahun 76,55 % 99,85 % 75,9 % 83,6 % 100 % 100 % 100 % 24 % 10 % 30 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 87 % 85,8 % 88,74 % 2002,9 10,25 % 11,14 % 16,1 % 27,79 % 99,82 % 99,82 % 91,53 % - -
	Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	3 BCB 1 buah 5 buah

	<p>Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah</p> <p>Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu</p>	<p>Penyelenggaraan festival seni dan budaya</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat</p> <p>Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik</p> <p>Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik</p> <p>Persentase mobil operasional laik jalan</p> <p>Persentase mobil dinas laik jalan</p> <p>Persentase kendaraan dinas laik jalan</p> <p>Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA</p> <p>Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat</p> <p>Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat</p> <p>Persentase laporan yang dibuat tepat waktu</p> <p>Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat</p>	<p>27 even</p> <p>81</p> <p>72 macam</p> <p>51 macam</p> <p>1 unit</p> <p>1 unit</p> <p>300 unit</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>A</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p>
--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan Laporan Capaian Kinerja Tahun Pertama dari Renstra 2018-2023. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam Renstra.

Laporan kinerja Triwulan IDinas Pendidikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi capaian atas indikator kinerja utama adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Anggaran 2019

No .	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi	Capaian	Target 2019	Realisasi	Capaian
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud Formal	%	73,30	78,63	104,4 %			
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun			100	12.7	12.10	95.28
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Paket A	%	100%	100,91	100,91			
2.	Rata - rata lama sekolah	Tahun	7,83		100	8	7.74	96.75

3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	%	99	93,14	94,8			
3.	Persentasi Satuan Pendidikan Terakreditasi A	%	4,76		100	6,59	0,079	1,20
4.	Persentasi Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100	98,83	98,83			
4.	Persentasi Paud Formal Terakreditasi A	%	1,25		100	2,50	0,012	0,48
5.	Persentasi Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100			
6.	Persentasi Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	100	100	100			
5.	Pridikat Akip	Nilai	81,82		100	82,55	80,09	97,02

Berdasarkan data diatas dapat di jelaskan bahwa:

1. Angka harapan lama sekolah yang di targetkan 2019 adalah 12.7 namun hanya terealisasi 12.10 dengan capaian 95,28 %, angka ini di dapatkan dari BPS
2. Rata rata lama sekolah yang di targetkan 8 dan terealisasi 7,74 dengan capaian 96,75 % angka ini juga didapat dari BPS
3. Persentasi satuan pendidikan terakreditasi A yang di targetkan tahun 2019 6,59 ternyata realisasinya hanya 0,079 dengan kata lain tidak mencapai target
4. Persentasi Paud Formal terakreditasi A yang ditargetkan tahun 2019 2,5, hanya terealisasi 0.012 sehingga capaian sangat rendah
5. Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD. Target ilai evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan yang ditetapkan tahun 2019 adalah 82,55 dan terealisasi 80,09 dengan capaian 97,02

Permasalahan yang dihadapi:

Berdasarkan data diatas persentasi Satuan Pendidikan Terakreditasi A dan Persentasi Paud Formal Terakreditasi A sangat rendah pencapaiannya hal ini disebabkan:

1. Dari Delapan Standar Penilaian dalam Akreditasi ada dua standar yang masih perlu peningkatan yaitu Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Standar Sarana Prasarana
2. Untuk Tenaga Pendidik masih banyak sekolah yang kekurangan guru, baik SD maupun SMP
3. Untuk Lembaga Paud Formal Pengelolaan yang banyak dilakukan oleh pihak masyarakat/swasta
4. Dalam Akreditasi dilakukan secara one line sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia yang punya ketrampilan IT

Rekomendasi:

1. Perlu dibuka Formasi untuk guru yang lebih banyak dan merata
2. Perlu perhatian terhadap Sarana Prasarana yang diperlukan di satuan pendidikan yang ada
3. Perlu pendampingan dan pembekalan kepada sekolah untuk mempersiapkan akreditasi agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, baik oleh Pengawas, Disdik
4. Perlu pendampingan operator yang menguasai IT di satuan pendidikan yang ada

1.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.2
Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
2.	Rata - rata lama sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$
3.	Persentasi Satuan Pendidikan Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan terakreditasi A}}{\text{Jumlah satuan pendidikan yang ada}} \times 100\%$
4.	Persentasi Paud Formal Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah PAUD Formal berakrediasi A}}{\text{Jumlah PAUD Formal yang ada}} \times 100\%$
5.	Pridikat Akip	Hasil Evaluasi AKIP

1.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sungai Selatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(5)
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka melek huruf	99,79 %	99,11	99,32 %
		Angka rata- rata lama sekolah	8 Tahun	8 tahun	100 %
		Angka Partisipasi Kasar (PAUD) Paud	76,55 %	77,29	100,10%
		Angka Partisipasi Murni (AMP) SD/MI/Paket A	99,85 %	72,88	72,88 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	75,9 %	70,96	93,49 %
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C	83,6 %	65,86	78,78 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100 %	99,14	99,14 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B	100 %	89,75	89,75 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C	100 %	75,73	75,73 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket C	24	22	91,67
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B	10	74	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C	30	1	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %	100	100 %
		Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	100 %	100	100 %
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	100 %	100	100 %
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/Mts	100 %	102,81	102,81 %
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	100 %	87,49	87,49 %
		Fasilitas Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	87 %	87%	100 %
		Fasilitas Pendidikan SMP/Mts Kondisi bangunan baik	85,8 %		
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		85,8	100 %
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	88,74 %	88,74	88,74 %
		Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	2002,9		
		Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah menengah	10,25	9,59	93,56%
		Rasio guru/ murid per kelas rata - rata sekolah dasar	11,14	8,62	77,37%
		Rasio guru/ murid per kelas rata- rata sekolah menengah	16,1	7,86	48,82%
		Rasio guru/ murid per kelas rata- rata sekolah menengah	27,79	4,05	14,57%
		Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,82	99,11	99,29%
		Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,82 %	99,11	99,29%
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	91,53 %	91,50	99,97 %
			-		-

	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	-
	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat	-	-	-
Meningkatnya pelestarian bangunan dan benda cagar budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	3 BCB	3 BCB	100 %
	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1 buah	1 buah	100 %
	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	4 buah	4 buah	100 %
Meningkatnya perkembangan kesenian dan hasil budaya daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	27 even	27 Even	100 %
Meningkatnya layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu	Indeks kepuasan masyarakat	81	-	-
	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	72 macam	72	100 %
		51 macam	51	100 %
	Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1	100 %
		1 unit	1	100 %
	Persentase mobil operasional laik jalan	300 unit	300	100 %
	Persentase mobil dinas laik jalan	100%	100	100 %
	Persentase kendaraan dinas laik jalan	100 %	100	100 %
	Persentase administarsi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100	100 %
	Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA	100%	100	100 %
	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100	100	100 %
	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat	A	A	100 %
	Persentase laporan yang dibuat tepat waktu	3 laporan	3	100 %
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat	100%	100	100 %	

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Angka Melek Huruf

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator pada triwulan IV masih berada pada 98,98% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 178.544 dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 180.153) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,11%.

2. Angka Rata rata Lama Sekolah

Angka ini didapat dari perhitungan Badan Pusat Statistik yang sudah mempunyai rumus tertentu untuk perhitungannya, seperti yang tercantum di IKU Dinas Pendidikan tahun 2019

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di PAUD dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 4 – 6 Tahun dikali 100%. APK PAUD pada tahun 2019 realisasinya sebesar 77,29% (Jumlah siswa PAUD usia 4 – 6 tahun 9.558 dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun 12.366). dari target 76,55% dengan capaian 100,10%

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 72,88% (jumlah peserta didik usia 7 - 12 tahun 17.998 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun 24.695) dari 99,85% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 72,88%. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 7 -12 tahun menyebabkan pencapaian APM SD/MI belum terpenuhi.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2019 sebesar 70,96 (jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun 9.852 dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 12.169) dari 75,9% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 93,49%.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 16- 18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 16 -18 tahun dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2019 sebesar 65,86% (jumlah peserta didik usia 16- 18 tahun 7.395 dibagi jumlah penduduk usia 16 -18 tahun 11.229) dari 83,6% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 78,78%.

7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 72,88% (jumlah peserta didik usia 7 - 12 tahun 14.679 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun 24.913) dari 100% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 99,04%. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 7 -12 tahun menyebabkan pencapaian APM SD/MI belum terpenuhi.

8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/Mts/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 13 -15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 89,978% (jumlah peserta didik usia 13 -15 tahun 10.949 dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 12.169) dari 100 % yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 89,97 %. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 13 -15 tahun menyebabkan pencapaian APM SMP/Mts belum terpenuhi.

9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 16 -18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 16 -18 tahun dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 75,73% (jumlah peserta didik usia 16 -18 tahun 8.504 dibagi jumlah penduduk usia 16 -18 tahun 11.229) dari 100 % yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 75,73%. Masih ada siswa yang sekolah tidak berdasarkan usia 16 -18 tahun menyebabkan pencapaian APM SMA/SMK/MA/Paket C belum terpenuhi.

10. Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang tidak bersekolah lagi (22 orang) dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang pernah/sedang bersekolah (18.797) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 22 orang dari 24 orang yang ditargetkan.

11. Angka Putus Sekolah SMP/Mts/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah lagi (74 orang) dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang pernah/sedang bersekolah (4.961) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 74 orang dari 10 orang yang ditargetkan.

12. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA/Paket C

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 16 -18 tahun yang tidak bersekolah lagi (1 orang) dibagi jumlah penduduk usia 16 -18 tahun yang pernah/sedang bersekolah (5.320) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 1 orang dari 30 orang yang ditargetkan.

13. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI (3.210) dibagi Jumlah Siswa Peserta Ujian Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun 2019 (3.210) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 100%

14. Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/Mts (3.035) dibagi Jumlah Siswa Peserta Ujian Pada Jenjang SMP/Mts Pada Tahun 2019 (3.035) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 100%

15. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMA/SMK/MA (1.367) dibagi Jumlah Siswa Peserta Ujian SM/MK/MA Pada Tahun 2019 (1.367) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 100%

16. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu (3.185) dibagi jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah (3.098). Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 102,81% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 102,81%.

17. Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts ke SMA/SMK/MA

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu (3.035 orang) dibagi jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yg lebih rendah (3.469 orang) dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 87,49 % dari target 100% dengan capaian sebesar 87,49%.

18. Fasilitas Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Fasilitas Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di tahun 2019 targetnya adalah 87 % dan realisasinya adalah 87% artinya capaian yang diperoleh adalah sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan

19. Fasilitas Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik

Fasilitas Pendidikan SMP/Mts kondisi bangunan baik ditahun 2019 targetnya adalah 85,8% dan realisasinya adalah 85,8% artinya capaian yang diperoleh adalah sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan

20. Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar

Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah sekolah dan penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2019, dimana jumlah sekolah pada tingkat pendidikan dasar adalah 242 sekolah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 24.913 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 116,57 % melebihi dari target sebesar 88,74 %

21. Rasio Ketersedian Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah

Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2019, dimana jumlah sekolah

pada tingkat pendidikan menengah adalah 37 buah yang terdiri dari kelas VII sampai dengan kelas IX dengan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun 12.169 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 183,90% dari target sebesar 10,25 %

22. Rasio guru/ murid pendidikan dasar

Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru dan murid pendidikan dasar pada tahun 2019, dimana jumlah guru pada tingkat pendidikan dasar adalah 1.804 orang dengan jumlah murid SD 18.797 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 9,59 % dari target sebesar 10,25 %

23. Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah menengah

Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru dan murid pendidikan sekolah menengah pada tahun 2019, dimana jumlah guru pada tingkat pendidikan menengah adalah 428 orang dengan jumlah murid SMP 4.961 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 8,63 % dari target sebesar 11,14 % yang artinya masih ada kekurangan guru untuk sekolah menengah

24. Rasio guru/murid per kelas rata rata sekolah dasar

Angka ini diperoleh dari perbandingan ruang kelas dan murid pendidikan rsekolah das pada tahun 2019, dimana jumlah ruang kelas pada tingkat pendidikan sekolah dasar adalah 1.479 ruang dengan jumlah murid SD 18.797 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 9,60 % dari target sebesar 16,1 %

25. Rasio guru/ murid per kelas rata rata sekolah menengah

Angka ini diperoleh dari perbandingan ruang kelas dan murid pendidikan sekolah menengah pada tahun 2019, dimana jumlah guru pada tingkat pendidikan menengah adalah 201 ruang dengan jumlah murid SMP 4.961 orang sehingga realisasi pada tahun 2019 sebesar 4,05 % dari target sebesar 27,79 %

26. Angka melek huruf usia 15 – 24 tahun perempuan dan laki laki

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 -24 Tahun Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15- 24 Tahun dikali 100 %. Realisasi indikator pada tahun 2019 masih berada pada 99,11 % (Jumlah Penduduk Usia 15- 25 Tahun Dapat Baca 178.544 dibagi Jumlah

Penduduk Usia 15 – 24 tahun 180.153) dari 99,82 % yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,28%.

27. Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf

Angka ini diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 masih berada pada 99,11% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 178.544 dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 180.153) dari 99,82 % yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,28%.

28. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D IV

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah tenaga pendidik yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebesar 91,50 % dari 91,53% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 99,97 %. Angka diperoleh jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV sebanyak 3.327 dibagi jumlah guru seluruhnya sebanyak 3636 orang dikali 100%.

29. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum meletakkan target karena belum ada SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini

30. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Masyarakat

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum meletakkan target karena SPM untuk pendidikan masyarakat belum ada

31. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Bidang kebudayaan menargetkan benda cagar budaya yang dilestarikan tahun 2019 sebanyak 3 bcb yang kesemuanya terealisasi sebanyak 3 bcb sehingga pencapaiannya 100 %

32. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Target karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi pada tahun 2019 sebanyak satu buah dan itu terealisasi dengan baik sehingga pencapaian sebesar 100 %

33. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Cagar budaya yang dikelola secara terpadu tahun 2019 ditargetkan sebanyak 5 buah, yang semuanya terealisasi dengan baik sehingga target tercapai 100 %

34. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pada tahun 2019 penyelenggaraan festival seni dan budaya di targetkan sebanyak 27 even yang kesemuanya terealisasi dengan baik sehingga target tercapai 100 %

35. Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk realisasi indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 81,48

36. Persentasi peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah peralatan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada tahun 2019 72 macam dari 72 macam yang ditargetkan.

37. Persentasi perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan gedung kantor yang ada dikali 100%. Realisasi pada tahun 2019 51 macam dari 51 macam yang ditargetkan.

38. Persentasi Mobil operasional laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil operasional laik jalan di bagi mobil operasional yang ada dikali 100%. Realisasi tahun 2019 sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

39. Persentasi Mobil Dinas Laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah mobil dinas yang laik jalan dibagi jumlah mobil dinas yang ada dikali 100%. Realisasi tahun 2019 sebanyak 1 unit dari 1 unit yang ditargetkan.

40. Persentasi kendaraan dinas laik jalan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kendaraan dinas yang laik jalan dibagi jumlah kendaraan dinas yang ada dikali 100%. Realisasi tahun 2019 sebanyak 300 unit dari 300 unit yang ditargetkan.

41. Persentasi administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi

kepegawaian yang ada dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2019 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

42. Persentasi kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA. Realisasi indikator tahun 2019 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

43. Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2019 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian 100%.

44. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan pada Tahun 2019 kategori BB dengan nilai 80,09 (sangat baik).

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memperoleh nilai A.

45. Persentasi laporan yang dibuat tepat waktu

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah laporan yang dibuat tepat waktu dibagi jumlah laporan yang ada dikali 100%. Realisasi indikator pada tahun 2019 sebanyak 3 laporan dari 3 laporan yang ditargetkan.

46. Persentasi temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat.

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggung jawaban keuangan harus selalu ditindak lanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%. Selain persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam hal pelaporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kab. HSS.

1.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Bidang Sekretariat:

Tabel 3.4
Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Triwulan IV Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	142.785.630	124.103.100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	336.900.000	186.394.814
3	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	19.000.000	19.000.000
4	Penyediaan makanan dan minuman	72.830.000	57.207.500
5	Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis lainnya	3.683.450.000	2.960.599.043
6	Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	1.275.626.000	1.130.304.771
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.325.000	87.635.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	519.500.000	360.887.137

3	Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	13.014.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.425.000	4.413.000
2	Penyusunan Dokumen Akip	4.425.000	4.413.000
	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		
1	Pembinaan Dewan Pendidikan	22.392.000	19.602.000
2	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi	433.370.000	389.254.800
3	Peringatan Hari Guru	144.600.000	143.850.000
4	Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Sekolah	58.350.000	55.050.000
	Jumlah	6.846.428.630	5.454.728.165

Program dan kegiatan di sekretariat di dukung dengan dana sebesar **Rp.6.846.428.630** dengan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar **Rp.5.454.728.165** atau **79,67 %**. Selain mendukung kegiatan untuk bidang (Bidang PAUD dan DIKMAS, Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP dan Bidang Kebudayaan) juga mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik;
3. Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik;
4. Persentase mobil operasional laik jalan;
5. Persentase mobil dinas laik jalan;
6. Persentase kendaraan dinas laik jalan;
7. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu;
8. Persentase kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan SIMDA;
9. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti pada sekretariat;
10. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat;
11. Persentase laporan yang dibuat tepat waktu;
12. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti pada sekretariat.

2. Bidang PAUD Dan DIKMAS:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi pada Bidang PAUD Dan DIKMAS
Triwulan IV Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
----	------------------	---------------	----------------

1	2	3	4
I	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	660.182.825	
1	Penambahan ruang kelas sekolah	177.600.000	177.021.000
2	Pembangunan gedung sekolah	188.200.000	186.040.000
3	Penambahan ruang kelas sekolah {DAK}	216.754.975	205.783.975
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah {DAK}	77.627.850	77.627.850
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1.998.404.000	
1	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	188.210.000	179.363.806
2	Pengadaan meubeleir sekolah	114.080.000	108.650.000
3	Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa	99.950.000	98.898.180
4	Bimbingan teknis pendidikan keluarga	61.975.000	61.395.000
5	Sosialisasi akreditasi lembaga Paud dan Dikmas	16.135.000	16.135.000
6	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1.191.054.000	1.071.669.000
7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Penyelenggara {BOP} Paud	210.000.000	207.584.250
8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa {DAK}	78.000.000	
9	Pengadaan Buku buku dan alat tulis siswa	39.000.000	
	Program Pendidikan Non Formal	1.727.136.175	
1	Penyelenggaraan paket C setara SMU	204.550.000	156.910.000
2	Penyelenggaraan paket B setara SMP	132.460.000	103.339.400
3	Penyelenggaraan lembaga non formal	121.875.000	114.485.400
4	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal {DAK}	1.118.251.175	816.290.000
5	Penyelenggaraan Paket C setara SMU/ BOP kesetaraan (DAK)	45.000.000	44.425.000
6	Penyelenggaraan Paket B setara SMP/ BOP kesetaraan (DAK)	105.000.000	103.650.500
	JUMLAH	4.335.723.000	3.729.268.361

Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan DIKMAS didukung dengan pagu dana sebesar **Rp.4.335.723.000** dengan realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar **Rp.3.729.268.361** atau 85 %. Program dan kegiatan pada bidang Paud dan Dikmas mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal;
2. Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik;
3. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV;
4. Persentase tenaga pendidik PAUD FORMAL yang memiliki sertifikat pendidik;
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik PAUD;

6. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A.
7. Persentase PNF yang terakreditasi
8. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).

3. Bidang Pendidikan SD:

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SD
Triwulan IV Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar		
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	764.450.000	745.857.000
	Pembangunan ruang ibadah	324.800.000	323.850.000
	Pembangunan perpustakaan sekolah	197.350.000	136.896.000
	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	249.900.000	247.012.000
	Pengadaan Meubeler Sekolah	200.610.000	200.110.000
	Pembangunan Pagar Sekolah	372.950.000	371.379.000
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD	406.477.100	369.328.700
	Pelaksanaan ujian sekolah {UN} SD	273.512.500	273.215.000
	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	3.367.425.000	3.350.054.627
	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah {MBS} di satuan Pendidikan dasar	8.435.000.000	7.012.400.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	1.908.080.000	1.908.400.000
	Penambahan ruang guru kelas sekolah (DAK)	110.038.000	110.038.000
	Pembayaran Sarana Air Bersih dan Sanitary {DAK}	261.285.000	261.285.000
	PPenyediaan Buku Pelajaran dan alat tulis untuk SD/MI/SDLB dan SMP/Mts {DAK}	1.004.675.000	1.001.722.420
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa {DAK}	182.970.000	166.543.500
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah {DAK}	102.697.000	102.697.000
	Jumlah	18.162.219.600	16.580.788.247

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD didukung dengan pagu dana sebesar **Rp.18.162.219.600** dengan realisasi keuangan pada

tahun 2019 sebesar **Rp.16.580.788.247** atau **91,29 %**. Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SD mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar
4. Persentase tenaga pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SD
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar
7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
8. Persentase satuan sekolah dasar yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah dasar
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah dasar

4. Bidang Pendidikan SMP:

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pendidikan SMP
Triwulan IV Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pembangunan ruang ibadah	322.900.000	322.040.000
	Pengadaan Mebeleur Sekolah	200.190.000	199.690.000
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	614.750.000	613.435.000
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	234.025.000	191.238.000
	Pelaksanaan ujian sekolah (UN) SMP	598.679.000	571.108.400
	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	217.750.000	216.938.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.179.702.000	1.172.785.171
	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah {DAK}	2.060.600.000	2.055.850.000
	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	793.860.000	791.010.000
	Pembangunan perpustakaan sekolah {DAK}	1.317.630.000	1.314.780.000
	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah {DAK}	1.029.290.000	1.027.390.000
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary {DAK}	259.900.000	258.000.000

	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	263.330.000	208.043.000
	Pembangunan ruang belajar pendidikan inklusif {DAK}	231.840.000	230.770.000
	Jumlah	9.324.446.500	9.173.077.571

Program dan kegiatan pada bidang pendidikan SMP didukung dengan pagu dana sebesar **Rp.9.324.446.500** terealisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar **Rp.9.173.077.571** atau **98,38%**. Program kegiatan pada bidang pendidikan SMP ini mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
3. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama
4. Persentase tenaga pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
5. Persentase hasil post test pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga pendidik SMP
6. Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama
7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
8. Persentase satuan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A
9. Persentase sekolah hijau pada satuan sekolah menengah pertama
10. Persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama
11. Persentase pemenuhan SPM pada satuan sekolah menengah pertama

5. Bidang Kebudayaan:

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Kebudayaan
Triwulan IV Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya		
	Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	196.405.000	175.345.000
	Pembinaan dan Pelestarian Nilai Sejarah dan Perjuangan Bangsa	404.466.000	404.066.000
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	712.028.000	704.030.988
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	277.655.000	271.291.500
	Festival budaya meratus	65.072.500	56.100.000
	Festival Olah Raga Tradisional	164.232.500	157.157.000

	dan Permainan Rakyat		
	Festival Karasmin Banua	113.490.000	111.990.000
	Festival Luar Daerah	73.750.000	61.050.000
	Pengelolaan Permeseuman {DAK}	450.000.000	450.000.000
	Jumlah	2.457.099.000	2.391.030.488

Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan didukung dengan pagu dana sebesar Rp.2.**457.099.000** realisasi keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp.2.**391.030.488** atau **97,31** %. Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya bangunan yang baik dan terlindungi;
2. Persentase cagar budaya (makam) yang baik dan terlindungi;
3. Persentase kesenian daerah yang aktif;
4. Persentase hasil budaya daerah yang masih aktif/terpelihara.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 yang dapat disusun merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari sasaran yang ditetapkan.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang;
2. Masih ada indikator kinerja sasaran yang tidak didukung oleh program dan kegiatan;
3. Masih ada program dan kegiatan yang tidak mendukung pada indikator kinerja;
4. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Melihat kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dapat diambil langkah - langkah sebagai berikut:

1. Agar menempatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang dibutuhkan;
2. Dalam penyusunan program dan kegiatan harus mengacu pada indikator sasaran strategis;
3. Untuk mempercepat pencapaian indikator sasaran strategis maka harus didukung oleh program dan kegiatan yang mendukung pada indikator sasaran strategis tersebut;
4. Jadwal setiap kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhirnya, semoga Allah meridhoi segala upaya kita dalam membangun masa depan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Desember 2019

KEPALA DINAS



NORDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681010 199603 1 004